

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis pengaruh komponen pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Hasil uji F menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh secara simultan terhadap belanja daerah. Kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah terhadap belanja daerah, yang secara simultan berpengaruh sebesar 69,6%, sedangkan 30,4% dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian. Variabel di luar penelitian yang dimaksud dapat berupa dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU) maupun dana bagi hasil (DBH).
2. Hasil uji analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap belanja daerah. Pajak daerah menunjukkan angka -0.011 , yang berarti pajak daerah berpengaruh secara negatif terhadap belanja daerah. Retribusi daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja daerah, dilihat dari hasil uji yang menunjukkan angka $+18.002$, yang berarti retribusi daerah berpengaruh secara positif terhadap belanja daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh secara parsial terhadap belanja daerah, hasil uji analisis regresi linier berganda menunjukkan angka $+16.516$, yang berarti bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan berpengaruh secara positif terhadap belanja daerah. Lain-lain PAD yang sah menunjukkan angka +4.513, yang menunjukkan lain-lain PAD yang sah berpengaruh secara positif dan parsial terhadap belanja daerah.

3. Hasil uji dominan, dilihat dari nilai *standardized coefficients beta* menunjukkan bahwa lain-lain PAD yang sah berpengaruh dominan terhadap belanja daerah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola dengan lebih baik lagi pendapatan dari sektor pajak daerah, yang dapat memberikan kontribusi lebih besar. Pemerintah Daerah dapat memberikan penyuluhan sadar pajak kepada masyarakat dengan lebih menggambarkan alur dan proses pajak daerah diolah, dengan cara yang lebih mudah dipahami. Sehingga masyarakat memiliki kesadaran membayar pajak.
2. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menggali dan mengkaji potensi serta aset daerah yang dapat dikelola dalam bentuk kerja sama dengan pihak investor maupun disewakan sebagai sumber pendapatan daerah.
3. Pemerintah daerah sebaiknya mengkaji ulang peraturan daerah mengenai pemanfaatan dan pemberdayaan aset/harta/barang daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah dari segi pengelolaan aset daerah. Sehingga dalam pemanfaatan dan pemberdayaan

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

aset/harta/barang daerah, pemerintah daerah tidak hanya mengacu pada satu peraturan yang mendasari, karena banyak peraturan yang saling terkait dalam mengelola aset/harta/barang daerah, agar dalam proses pengambilan keputusan maupun pertimbangan dalam membuat peraturan, pejabat terkait mempunyai banyak referensi mengenai peraturan-peraturan terkait dalam mengelola aset/harta/barang daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Alamri Rosa. 2015. *Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap belanja daerah (studi kasus kabupaten-kota di provinsi gorontalo).*
- Arianto Puspita Suci, Padmono Yazid Yud. 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di kota surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 1*
- Ardiansyah Oni. 2014. Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap alokasi belanja daerah, *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Vol.3 No.4.*
- Badjulu Ramlianty. 2014. Analisis pengaruh sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) terhadap alokasi belanja daerah pada Kabupaten Tojo Una-Una. *e-Jurnal Katalogis, Vol.2 No.7 hlm 78-88.*
- Bagijo Himawan Estu. 2011. Pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah (studi kasus di kabupaten/kota dan pemerintah propinsi jawa timur). *Perspektif, Vol. XVI No.1 Edisi Januari*
- Bastian Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar.* Erlangga. Jakarta.
- Erlina,Rambe Sakti A., Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI.* Salemba Empat. Jakarta.
- Frendy Apris Khoir. 2012. *Evaluasi potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah di kabupaten wonogiri.* Universitas Muhammadiyah. Surakarta
- Halim Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik.* Salemba Empat. Jakarta.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

- Halim A., Kusufi Syam M. 2013. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah, SAP Berbasis Akrua*. Salemba Empat. Jakarta.
- Heryanto Adrian. 2016. *Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (pad) (studi kasus daerah istimewa yogyakarta)*. Universitas PGRI. Yogyakarta
- Hoesada Jan. 2016. *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Julitawati Ebit, Darwanis, Jalaluddin. 2012. Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. ISSN 2302-0164, pp 15-29.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Andi. Yogyakarta
- Mustika Winda Ayu. 2014. Kontribusi pajak daerah dan retribusi terhadap pendapatan asli daerah di pemerintah kota surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol.6*
- Nordiawan D.,Putra Sondi I.,Rahmawati M. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

Prasetya Vincentius Septian. 2009. *Perbandingan penerimaan pajak daerah dengan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten grobogan*. Universitas Sebelas Maret. 2009

Pratomo Yulius Agus Linggau.2016. Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD terhadap belanja daerah di Kabupaten Bantul, *Skripsi Akuntansi Sanata Dharma*.

Priantara Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Mitra Wacana Media. Jakarta

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

- Puspitasari Elfayang Rizky Ayu. 2014. *Analisis efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pad kabupaten blora tahun 2009-2013*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Ramlan, Darwanis, Abdullah Syukriy. 2016. Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal (studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh) *.Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, ISSN 2302-0164 pp.79-88
- Renyowijoyo, Muindro. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba : Edisi 3*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Roslina Nina. 2014. *Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (pad) kabupaten dan kota di indonesia periode tahun 2006-2010*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Sujarweni Wiratna V. 2015. *Akuntansi Sektor Publik,Teori,Konsep,Aplikasi*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Suwarno Chornellia Stella Hartanti. 2016. *Pengaruh nilai tukar rupiah, harga minyak bumi dunia dan harga emas dunia terhadap harga saham perusahaan pertambangan yang listing di bursa efek indonesia (studi ekonomi indonesia periode tahun 2013-2015)*. Universitas Katolik Widya Karya. Malang
- Syafrudin Ahmad. *Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah kabupaten kudas tahun 2004-2013*. Universitas Pandanaran. Semarang
- Tahwin Muhammad. 2013. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol.18 No.2*

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Utomo Okta Sigit. 2013. *Analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (studi empiris di dppkad wilayah karesidenan surakarta)*. Universitas Muhammadiyah. Surakarta

Yusuf M. 2010. *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Salemba Empat. Jakarta

www.djpk.depkeu.go.id , diakses tanggal 03 Mei 2017

